

Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Warga Untuk Mewujudkan Desa Wisata Perean Kangin Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

Anak Agung Ketut Sri Candrawati, I Ketut Sukantha Artha Wibawa, I Nyoman Janayasa

1. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Margarana Tabanan, Indonesia

*Correspondence author: agungcandrawati836@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the leadership strategies employed by the Village Head of Perean Kangin to mobilize community participation in realizing a Tourism Village. Using a qualitative case study approach, the research found that a transformational-participatory leadership style—characterized by collective vision building, dialogical communication, institutional empowerment, role modeling, and non-material recognition—successfully fostered a sense of ownership, mobilized local resources, and shifted villagers from objects to subjects of development. The findings highlight that effective mobilization of participation depends on trust, empowerment, and the internalization of a shared vision.*

Keywords: *Leadership; strategy; community participation; tourism village; Perean Kangin.*

How to Cite:

Candrawati, A. A. K. S., Wibawa, I. K. S. A., & Janayasa, I. N. (2026). Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Warga Untuk Mewujudkan Desa Wisata Perean Kangin Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 52-62. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.11.1.2026.52-62>

1. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.) menjelaskan bahwa Desa merupakan Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Republik, 2014).

Kepala Desa memiliki posisi yang unik dan strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin pembangunan, pembina kemasyarakatan, dan pemberdaya masyarakat. Di tingkat akar rumput, Kepala Desa beroperasi dalam ruang yang intim antara birokrasi formal dan nilai-nilai sosial budaya informal seperti gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal. Kepemimpinan Kepala Desa yang efektif dalam konteks Desa Wisata tidak cukup hanya mengandalkan wewenang formal atau instruksi birokratis. Ia harus mampu membangun kepercayaan (trust) di antara warga, mengomunikasikan visi yang jelas dan menginspirasi, menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan konflik,

memberikan keteladanan melalui aksi nyata, dan juga menciptakan sistem penghargaan yang memotivasi partisipasi sukarela.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan organisasi komunikasi lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan Self-Governing Community (kesatuan masyarakat hukum). Secara filosofis sangat jelas bahwa sebelum tata pemerintahan diatasnya ada, desa itu lebih dulu ada, oleh karena itu, sebaiknya desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Menurut Raharjo Adisasmita (2011) menyatakan bahwa Pembangunan pedesaan dan perkotaan adalah upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masing-masing wilayah berdasarkan karakteristiknya. Pembangunan pedesaan berfokus pada sektor agraris dan pemanfaatan potensi lokal, sedangkan perkotaan berfokus pada jasa, industri, dan distribusi. Keduanya saling bergantung sebagai satu kesatuan sistem. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, pemerintah saat ini menerapkan pendekatan keterkaitan desa-kota (rural-urban linkage). Pendekatan ini memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di kota (menghindari ketimpangan), tetapi juga menghubungkan ekonomi desa secara langsung dengan rantai pasok global di kota (Yoeti, 2008).

Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan pedesaan mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan sentralistik dan top-down menuju pendekatan partisipatif dan berbasis lokal. Salah satu model pembangunan yang semakin populer di Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi alam dan budaya, adalah Desa Wisata. Konsep Desa Wisata tidak hanya menawarkan peluang ekonomi melalui sektor pariwisata, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Mardikanto & Soebianto, 2013).

Desa Wisata menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama, bukan sekadar objek atau penonton. Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat bergantung pada sejauh mana warga desa terlibat secara aktif, sukarela, dan memiliki rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap program-program yang dijalankan. Tanpa partisipasi yang tulus dari masyarakat, berbagai potensi yang dimiliki desa baik berupa keindahan alam, tradisi, seni, maupun kearifan lokal tidak akan mampu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga pengawasan. Ini merupakan kunci utama keberhasilan dan pilar kemandirian agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan warga sesuai dengan pendapat (Prayitno & Subagiyo, 2018) tentang partisipasi Masyarakat dan Pembangunan desa. (Wulandari & Arismayanti, 2021) dalam jurnalnya mengatakan partisipasi Masyarakat dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Tabanan. Partisipasi masyarakat

telah diakui secara luas sebagai prasyarat fundamental dalam pembangunan desa yang partisipatif. Desa Wisata, partisipasi mencakup keterlibatan warga dalam seluruh tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Berdasarkan pendapat Totok Mardianto (2023) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik adalah strategi pembangunan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas warga melalui akses sumber daya dan pembuatan keputusan. Kebijakan ini menggeser peran negara dari penyedia tunggal menjadi fasilitator agar masyarakat mampu keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Namun, dalam praktiknya, menggerakkan partisipasi bukanlah pekerjaan mudah. Banyak desa yang memiliki potensi luar biasa justru gagal berkembang karena:

Rendahnya kesadaran dan inisiatif warga akibat pola pikir paternalistik atau ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Konflik kepentingan antar kelompok masyarakat, misalnya antara pemilik lahan, petani, pelaku usaha, dan tokoh adat.

Ketergantungan pada pihak eksternal (investor, pemerintah daerah, atau lembaga donor) yang seringkali mengabaikan aspirasi lokal.

Kurangnya rasa memiliki terhadap program desa wisata karena proses perencanaan yang tidak inklusif.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan finansial warga untuk berpartisipasi secara aktif.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan potensi saja tidak cukup. Dibutuhkan kepemimpinan lokal yang efektif seseorang yang mampu memobilisasi, menginspirasi, mengoordinasikan, dan memberdayakan warganya untuk bersama-sama mewujudkan visi desa wisata.

Dalam dinamika pembangunan pedesaan kontemporer, konsep desa wisata telah muncul sebagai salah satu strategi unggulan untuk menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi alam, budaya, dan kearifan lokal. Namun, keberhasilan pengembangan desa wisata tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya yang dimiliki, melainkan terutama oleh sejauh mana masyarakat desa terlibat secara aktif, sukarela, dan penuh rasa memiliki dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi warga menjadi faktor kunci yang membedakan antara desa wisata yang berkelanjutan dengan yang hanya bersifat proyek jangka pendek yang bergantung pada pihak luar. Sesuai dengan pendapatnya Agus Dwiyanto (2015) Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik adalah konsep di mana pemerintah berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis melalui penyampaian layanan prima yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat

Sayangnya, dalam praktiknya, banyak desa yang memiliki potensi wisata besar justru mengalami kegagalan karena rendahnya partisipasi masyarakat, konflik kepentingan antar warga, atau ketergantungan berlebihan pada investor eksternal. Di sinilah peran kepemimpinan kepala desa menjadi sangat krusial. Sebagai pemimpin formal sekaligus tokoh yang dekat dengan nilai-nilai sosial budaya setempat, kepala desa diharapkan mampu menjadi katalisator yang mengubah partisipasi pasif menjadi aksi kolektif yang terorganisasi. Namun, tidak semua kepala desa memiliki kapasitas, strategi, dan legitimasi yang cukup untuk menggerakkan warganya secara efektif. Sesuai pendapat dari Sondang P Siagan (2015) mengatakan bahwa Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi anggota tim agar mencapai

tujuan bersama. Perilaku Organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berinteraksi di dalam lingkungan kerja. Keduanya saling bergantung; kepemimpinan yang efektif membentuk perilaku organisasi yang positif dan produktif. Kinerja sebuah organisasi sangat bergantung pada bagaimana pimpinannya mengelola perilaku tim. Gaya kepemimpinan yang tepat akan menciptakan iklim kerja yang mendukung pertumbuhan dan loyalitas (Siagian, 2015).

Di tengah kondisi ideal bahwa partisipasi adalah kunci, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa menggerakkan partisipasi adalah pekerjaan yang kompleks dan dinamis. Desa Perean Kangin menarik untuk diteliti karena berhasil menunjukkan transformasi menuju desa wisata melalui peran sentral Kepala Desa. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: Strategi kepemimpinan seperti apa yang diterapkan Kepala Desa Perean Kangin sehingga mampu menggerakkan partisipasi warganya secara nyata?

Di Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, terdapat potensi unggulan berupa keindahan alam perbukitan, persawahan terasering (subak), budaya Bali Aga, ritual metirta, arsitektur tradisional, serta kerajinan lokal. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi partisipasi warga yang belum optimal, infrastruktur pendukung wisata yang terbatas, pemasaran yang masih bersifat lokal, serta koordinasi antar-kelompok masyarakat yang belum berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi kepemimpinan yang tepat dari Kepala Desa untuk menggerakkan partisipasi warga secara nyata dan berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, yang berfokus pada strategi kepemimpinan Kepala Desa Perean Kangin dalam konteks alamiah. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Desa Perean Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, karena desa tersebut sedang aktif mengembangkan desa wisata dengan keterlibatan masyarakat yang signifikan.

Sumber data primer meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BUMDes "Kerti Pertiwi", Ketua Pokdarwis, serta 10 warga aktif (pemandu lokal, pengelola homestay, seniman). Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes), notulensi rapat, profil desa, dan arsip kegiatan. Teknik pengumpulan data terdiri dari: (1) observasi partisipatif pada rapat perencanaan, kerja bakti, dan aktivitas wisata; (2) wawancara mendalam semi-terstruktur; (3) studi dokumentasi melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode, serta member checking. Penelitian ini memperhatikan etika dengan meminta persetujuan (*informed consent*) dari seluruh informan serta menjaga kerahasiaan data pribadi.

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Warga Untuk Mewujudkan Desa Wisata Perean Kangin Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kepala Desa Perean Kangin menerapkan strategi kepemimpinan yang integratif dan partisipatif, yang dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, pembangunan visi bersama. Kepala Desa tidak menetapkan visi secara sepihak, tetapi memfasilitasi serangkaian musyawarah desa (paruman) untuk merumuskan visi "Perean Kangin Menuju Desa

Wisata Berbasis Kearifan Lokal". Proses ini memastikan visi tersebut berasal dari aspirasi warga dan diakui sebagai milik bersama, sehingga menumbuhkan komitmen kolektif. Kedua, komunikasi transformasional. Gaya komunikasi Kepala Desa bersifat egaliter, empatik, dan mengedepankan pendekatan ngayah (bekerja dengan tulus) berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 (2019) adalah regulasi yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Aturan ini secara khusus menetapkan arah penggunaan Dana Desa agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa melalui peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Setiap program dirancang melalui dialog intensif, memastikan transparansi informasi dan mengurangi resistensi. Ketiga, pemberdayaan kelembagaan. Kepala Desa secara sistematis memperkuat peran BUMDes dan Pokdarwis sebagai motor pelaksana. BUMDes dikelola secara profesional dan menjadi penampung aspirasi ekonomi, sementara Pokdarwis diberi tanggung jawab penuh dalam operasional wisata. Pendelegasian wewenang ini membangun rasa percaya diri dan kemandirian kelompok. Keempat, keteladanan dan aksi nyata. Kepala Desa selalu berada di garda terdepan dalam setiap kerja bakti, pelatihan, atau promosi. pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang dituliskan pada jurnal Koernia, A.S., & Amanah, S (Koernia & Amanah, 2018) dan juga disampaikan pada jurnal Wiratama, I.G.B., & Suyana, I.M (Wiratama & Suyana, 2021) yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Tista. Komitmen dan etos kerjanya yang tinggi menjadi model bagi warga, mengubah perintah menjadi ajakan untuk bergotong royong. Kelima, sistem pengakuan sosial. Kontribusi warga, sekecil apapun, dihargai melalui pujian di forum umum, piagam penghargaan, atau pemberian kesempatan mewakili desa. Reward non-material ini ternyata sangat efektif memotivasi partisipasi sukarela.

Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memimpin sebuah Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa setempat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Mengutip jurnal Widyawati & Kalis (Widyawati & Kalis, 2023) tentang Gaya Kepemimpinan Transforsional Kepala Desa Cipta Karya Dalam Mewujudkan Desa Wisata. Posisi ini memiliki peran ganda: sebagai pemimpin pemerintahan, pembina kemasyarakatan, dan motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan dan keuangan yang lebih besar (Dana Desa) kepada desa, sekaligus meningkatkan kompleksitas tanggung jawab Kepala Desa

Kepemimpinan Kepala Desa sangat unik karena beroperasi di ruang yang intim antara birokrasi formal dan nilai-nilai sosial-budaya informal seperti:

Model kepemimpinan yang unik merupakan Pemimpin Administratif, (a) Kepala Desa bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan. (b) Pemimpin Sosial-Budaya berperan sebagai "orang tua" atau "pamong" bagi warga desa. Kepala Desa harus memahami adat-istiadat, nilai-nilai kearifan lokal, dan menyelesaikan konflik dengan pendekatan kekeluargaan. Keberhasilannya sering bergantung pada kepercayaan (*trust*) dan kharisma pribadi, bukan hanya pada wewenang formal.

UU Desa memberikan keuangan yang kuat dan kewenangan yang luas (berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa). Ini mengubah peran Kepala Desa dari sekadar "kepanjangan tangan" pemerintah daerah menjadi (a) Perencana pembangunan utama yaitu harus mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) secara partisipatif. (b) Entrepreneur Publik (Sosial) didorong untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). (c) Fasilitator dan pemberdaya yaitu peran bergeser dari instruktur menjadi fasilitator yang memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri prioritas pembangunannya melalui musyawarah.

Kualitas Kepemimpinan yang Efektif seperti (a) amanah dan jujur (Integritas), modal dasar untuk mendapatkan kepercayaan warga, terutama dalam pengelolaan dana. (b) komunikatif dan negosiator ulung: mampu berdialog dengan semua kalangan, dari petani hingga bupati. (c) visioner dan inovatif memiliki gambaran jelas tentang masa depan desa dan mampu mencari terobosan dengan sumber daya terbatas. (d) mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan pola kepemimpinan kolektif dan partisipatif, sesuai semangat gotong royong. (e) adil dan melayani tidak memihak pada kelompok tertentu dan siap melayani semua warga tanpa diskriminasi.

Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi warga untuk mewujudkan Desa Wisata Peraan Kangin Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan

Beberapa strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menggerakkan partisipasi warga untuk mewujudkan Desa Wisata Peraan Kangin sebagai berikut:

Analisis Awal yaitu Desa Peraan Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan potensi unggulan keindahan alam perbukitan, persawahan terasering, budaya Bali Aga, kerajinan lokal, dan kesejukan udara, tantangan partisipasi warga yang belum optimal, infrastruktur pendukung wisata yang terbatas, pemasaran yang masih lokal, dan koordinasi antar-kelompok masyarakat.

Strategi partisipasi warga (pendekatan 5p) yaitu (a) partisipasi (Participation) dengan Konsep "Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga". (b) pemberdayaan (Empowerment) konsep meningkatkan kapasitas warga sebagai subjek pembangunan.

Pemilikan (*Ownership*) menciptakan rasa memiliki sehingga warga menjaga dan mengembangkan.

Kemitraan (*Partnership*) membangun jejaring untuk saling menguatkan.

Penghargaan (*Appreciation*) memberikan apresiasi untuk memotivasi kontribusi.

Keterlibatan warga tidak hanya pada level tokenism (pelibatan simbolis) tetapi sudah mencapai level *citizen power* (pendelegasian wewenang dan kontrol masyarakat). Keberhasilan mengkonsolidasikan potensi lokal seperti upacara metirta, subak, dan arsitektur tradisional menjadi paket wisata menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif berfungsi sebagai perekat sosial dan katalisator sumber daya. Seperti yang dituliskan pada jurnal Nugrahani, R., & Utami, S (2022) mengenai partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Tajur. Namun, tantangan tetap ada, seperti menjaga konsistensi partisipasi generasi muda dan mengelola ekspektasi ekonomi dari pariwisata. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa masyarakat

yang kuat secara kultural, kepemimpinan yang sukses adalah yang mampu mengartikulasikan nilai-nilai lokal menjadi strategi pembangunan yang inklusif.

Tabel 1. Jadwal Kepala Desa Yang Telah Dilaksanakan (12 Bulan)

Tahap 1 Persiapan Dan Penyadaran (1-3 Bulan)			
Bulan	Kegiatan	Pelaksana	Target Output
Bulan 1	Sosialisasi Awal & Pemetaan Potensi: - Audiensi dengan Bendesa Adat, Kelian Banjar, dan tokoh masyarakat. - Survey partisipatif: identifikasi atraksi, produk, dan keahlian warga.	Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD	Peta potensi desa wisata dan daftar tokoh kunci.
Bulan 2	Pembentukan Tim Inti dan Penyusunan Rencana: - Musyawarah Desa khusus pembentukan Tim Penggerak Desa Wisata. - Workshop kecil penyusunan Konsep Awal Desa Wisata.	Kepala Desa, Tim Penggerak, Fasilitator	SK Tim Penggerak & Draft Konsep Desa Wisata.
Bulan 3	Grand Sosialisasi kepada seluruh warga: - "Saha Mebali" (kembali ke asal), festival kecil dengan pentas seni, pameran produk, dan diskusi terbuka tentang masa depan desa. - Pemutaran video inspirasi desa wisata sejenis.		
Tahap 2 Penguatan Kapasitas Dan Pengembangan Produk (Bulan 4-7)			
Bulan	Kegiatan	Pelaksana	Target Output
Bulan 4	Pelatihan Dasar dan perintisan kelompok: - Pelatihan <i>Homestay</i> dan <i>Hospitality</i> sederhana. - Pelatihan Pembuatan Paket Wisata Mini (jalan-jalan ke sawah, membuat canang). Pengembangan infrastruktur dasar dan branding:	Pokdarwis, PKK, Karang Taruna	10 rumah siap homestay dasar dan 3 paket wisata prototipe.
Bulan 5	- Gotong Royong pembuatan papan penunjuk arah, spot foto, dan perbaikan jalur trekking. - Workshop penentuan nama, logo, dan tagline Desa Wisata.. Pelatihan digital dan pemasaran:	Seluruh Warga, Tim Kreatif Muda	Infrastruktur dasar terpasang dan identitas visual resmi.
Bulan 6	- Pelatihan konten kreator dan pemasaran media sosial. - Pembuatan Website/Blog Sederhana dan peta digital.- Pemutaran video inspirasi desa wisata sejenis.	Pemuda, Tim Penggerak	Akun media sosial aktif (@wisatapereankangin) & website dasar.
Bulan 7	Uji Coba & Penyempurnaan: - "Soft Launching" untuk tamu terbatas (keluarga, pejabat, influencer lokal). - Evaluasi dan penyempurnaan	Tim Penggerak, Seluruh Warga	Daftar perbaikan & paket wisata yang sudah disempurnakan.

	berdasarkan masukan.		
	Evaluasi paruh dan perencanaan lanjutan:		
Bulan 8-12	- Musdes evaluasi partisipatif: pemasukan, masalah, aspirasi.	BPD, Tim Penggerak, Masyarakat	Laporan evaluasi & Rencana Aksi Tahap II.
	- Merencanakan pengembangan fase kedua (contoh: wahana agroeduwisata).		

Sumber data: Kantor Desa Perean Kangin, Baturiti, Tabanan 2025

Faktor Pendukung dan penghambat Kepala Desa Dalam Menggerakkan partisipasi warga untuk mewujudkan Desa Wisata Perean Kangin, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan
Faktor Pendukung

Kepala Desa sukses menggerakkan partisipasi warga jika mampu membangun kepercayaan, memfasilitasi ruang dialog yang inklusif, dan menunjukkan kepemimpinan yang melayani. Yang dikutip dari jurnal internasional Sutiarso, M.A., & Nugroho, P. (Sutiarso & Nugroho, 2024) *Tranparency, Accountability, Communication, and Leadership in Optimizing Community Participant for Religious Tourism Village Development Planning*. Dukungan terbesar berasal dari legitimasi di mata warga, sistem tata kelola desa yang transparan, dan pemanfaatan modal sosial yang sudah ada. Seperti yang dituliskan pada jurnal internasional (Qurayma dkk., 2024) *Development Model for increasing Community Participant in Tourism Management of Open Pit Salu Geosite in East Belitung Regency*. Partisipasi bukan sekadar kehadiran fisik, tetapi keterlibatan bermakna dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Faktor pendukung meliputi:

Faktor Kepemimpinan dan Kapasitas Pribadi, Kepala Desa yang bersedia ngayah (berbakti tanpa pamrih) dalam kegiatan adat dan bersih desa akan lebih mudah memobilisasi warga. Contoh: ikut memperbaiki jalur trekking atau membersihkan sumber air suci, tidak hanya memberi instruksi, tetapi mampu mendengar aspirasi warga di wantilan desa, lalu menyusun ulang prioritas kegiatan wisata berdasarkan masukan tersebut, dan juga pemahaman tentang homestay management, digital marketing, serta standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) membuat warga percaya bahwa desa wisata dikelola secara profesional.

Faktor Kelembagaan dan Tata Kelola Desa, Kelompok Sadar Wisata harus berisi perwakilan dari setiap banjar (dusun) di Perean Kangin, dengan pembagian peran jelas (pemandu, pengelola homestay, penjaga parkir, tim kebersihan), BUMDes menjadi wadah legal yang mengelola retribusi, distribusi keuntungan, dan reinvestasi. Kejelasan pembagian keuntungan (misal: 30% untuk pemilik homestay, 20% untuk Pokdarwis, 50% untuk kas desa dan dana sosial) mencegah konflik, Rapat rutin (misal: setiap minggu atau sebulan sekali) yang mencatat usulan, keputusan via konsensus, serta laporan realisasi kegiatan. Notulen dibagikan ke setiap banjar.

Faktor Sosial-Budaya dan Kepercayaan, Kearifan lokal sistem irigasi subak tidak hanya untuk sawah tetapi juga untuk mengatur jadwal kunjungan wisatawan ke persawahan. Ngayah diubah menjadi "jadwal gotong royong sadar wisata" tanpa menghilangkan nilai sakralnya, ika pemangku memberi nunas (restu) untuk kawasan tertentu dijadikan area wisata edukasi, maka warga akan ikut serta tanpa curiga, dengan menonjolkan identitas Perean Kangin (misal: cerita rakyat, upacara Mekotekan di Baturiti, atau tenun lokal), warga merasa terhormat melibatkan diri.

Faktor Sumber Daya dan Dukungan Eksternal, Bantuan dana Desa Wisata dari Dinas Pariwisata, pelatihan CHSE, dan bantuan promosi melalui Pesona Tabanan. Juga fasilitasi perizinan homestay dan sertifikasi, membuat digital mapping spot wisata, serta mendesain souvenir lokal. Kehadiran mereka juga memperkuat kepercayaan warga karena ada pihak “independen” yang mendampingi, Akses ke CSR (misal: pembangunan toilet umum, plang penunjuk jalan), serta pinjaman lunak BUMDes untuk pengembangan homestay.

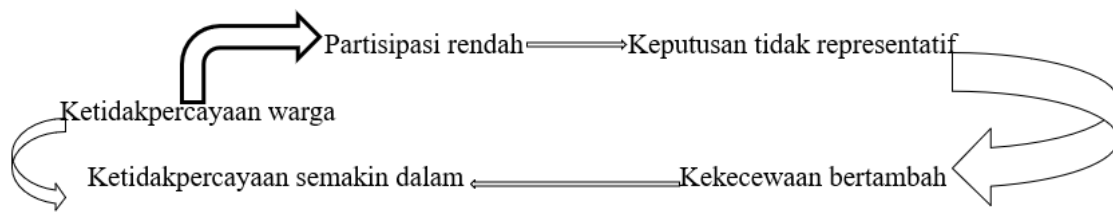
Faktor Strategi dan Pendekatan Partisipasi, Kepala Desa memfasilitasi warga mengidentifikasi sendiri aset mereka sawah terasering, mata air, kesenian gambelan, kebun kopi lalu menentukan jenis wisata yang cocok (agrowisata, ekowisata, wisata budaya), Kirim warga ke Desa Wisata Jatiluwih (Tabanan) atau Penglipuran (Bangli) untuk belajar. Setelah pulang, mereka menjadi pelatih bagi warga lain, Selain pembagian laba, berikan penghargaan simbolik (piagam, papan nama di spot wisata) untuk warga yang paling aktif. Sebaliknya, untuk warga yang tidak ikut menjaga kebersihan, diterapkan sanksi adat ringan seperti karang memadu (teguran terbuka di depan banjar).

Faktor Dukungan Politik dan Regulasi, Pemerintah desa memberikan ruang pada Awig-awig (hukum adat) yang mengatur perilaku wisatawan dan tata waktu kegiatan wisata (misal: tidak boleh ada tur pada hari raya Nyepi atau upacara Ngaben massal), Anggota DPRD dari dapil Baturiti yang pro-desanya akan memperjuangkan alokasi APBD untuk infrastruktur jalan Poros Perean, lampu penerangan, dan tempat sampah terpilah.

Faktor Penghambat

Kepala Desa sering menghadapi berbagai hambatan dalam menggerakkan partisipasi warga. Hambatan ini bersifat struktural, kultural, sosio-ekonomi, dan politis. Berikut adalah faktor-faktor penghambat utama adalah kurangnya kemampuan dalam merancang strategi partisipatif yang inklusif, minimnya keterampilan komunikasi dan negosiasi untuk menyatukan berbagai kepentingan warga, kurangnya visi yang jelas dan terkomunikasikan dengan baik mengenai desa wisata, tidak melibatkan secara aktif pemangku adat, pemuda, dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya kesenjangan komunikasi antara kepala desa dengan elit lokal, mindset tradisional yang belum sepenuhnya terbuka terhadap perubahan dan pariwisata, kuatnya pola paternalistik, di mana warga menunggu instruksi dari atas daripada berinisiatif, kecemasan akan perubahan seperti komersialisasi budaya dan dampak terhadap kehidupan sosial, prioritas warga pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari, sehingga partisipasi dalam kegiatan desa wisata dinomorduakan, keterbatasan modal warga untuk terlibat dalam pengembangan homestay, kuliner, atau usaha pariwisata lainnya. Tidak melibatkan secara aktif pemangku adat, pemuda, dan tokoh masyarakat dalam pengambilan Keputusan, adanya kesenjangan komunikasi antara kepala desa dengan elit lokal. program desa wisata hanya menjangkau sebagian kelompok, kurangnya media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan perkembangan dan peluang partisipasi.

Hambatan-hambatan di atas sering saling berkaitan dan membentuk siklus yang sulit diputus. Misalnya seperti terlihat pada gambar siklus dibawah.



Gambar 1. Siklus hambatan yang saling keterkaitan

Sumber data: Kantor Desa Perean Kangin, Baturiti, Tabanan 2025

Siklus ini dimulai ketika partisipasi warga rendah dalam musyawarah desa. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan cenderung tidak representatif karena hanya mencerminkan kepentingan segelintir elit atau kelompok tertentu. Keputusan yang tidak mewakili aspirasi mayoritas warga memicu ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah desa. Rasa tidak percaya ini diperparah ketika warga melihat bahwa keluhan atau saran mereka tidak direspons, sehingga kekecewaan bertambah. Kekecewaan yang berlarut-larut menyebabkan ketidakpercayaan semakin dalam, yang pada gilirannya membuat warga semakin enggan hadir dalam musyawarah atau terlibat dalam kegiatan desa. Akhirnya, kondisi ini kembali pada titik awal, yaitu partisipasi yang rendah, dan siklus negatif terus berulang.

4. Simpulan

Kepala Desa Perean Kangin menerapkan strategi kepemimpinan transformasional-partisipatif yang bertumpu pada lima pilar: pembangunan visi bersama, komunikasi dialogis, pemberdayaan kelembagaan, keteladanan, dan pengakuan sosial. Strategi ini berhasil menggerakkan partisipasi warga secara organik, ditandai dengan meningkatnya rasa memiliki, mobilisasi sumber daya lokal, serta perubahan peran warga dari objek menjadi subjek pembangunan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penggerakan partisipasi sangat ditentukan oleh kemampuan kepala desa membangun kepercayaan, bertindak sebagai fasilitator, dan menginternalisasi nilai gotong royong dalam setiap program desa wisata.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2011). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Koernia, A. S., & Amanah, S. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata (Kasus: Desa Wisata Pentingsari, Sleman). *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 2(4).
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Nugrahani, R., & Utami, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Kampung Tajur. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPK)*, 8(2).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).
- Prayitno, Gunawan., & Subagiyo, Aris. (2018). *Membangun desa : merencanakan desa dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan*. UB Press.
- Qurayma, V. A., Raya, A. B., Fatonah, S., Witjaksono, R., & Wahyudin, N. (2024). Development Model for Increasing Community Participation in Tourism Management of Nam Salu Open Pit Geosite in East Belitung Regency. *Agro*

Ekonomi, 35(1), 18. <https://doi.org/10.22146/ae.93205>

Siagian, S. P. (2015). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Rineka Cipta.

Sutiarso, M. A., & Nugroho, P. (2024). Transparency, Accountability, Communication, and Leadership in Optimizing Community Participation for Religious Tourism Village Development Planning. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (JISH)*, 13(1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014).

Widyawati, F., & Kalis, M. C. I. (2023). Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa Cipta Karya dalam Mewujudkan Desa Wisata. *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)*, 5(1).

Wiratama, I. G. B., & Suyana, I. M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Tista. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1).

Wulandari, N. P. Y., & Arismayanti, N. K. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*.

Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramita.